

Optimalisasi Administrasi Desa Menuju Kemandirian (Kolaborasi Responsif Optimalisasi Administrasi Desa)

Aras Solong¹, Sahrudin Malik², Nurkumalasari Syam³, Tetty Dwiyaniti⁴, Zulkarnain⁵, Subhan Djaya⁶, Mariati Rahman⁷, Djainuddin⁸, Nurain Quraini⁹

¹⁻⁹Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia

*nurkumalasarisyam@uim-makassar.ac.id

Abstract

"Sapa Publik" (Public Outreach) is a collaborative community service initiative aimed at optimizing village administration to foster self-reliance. This is achieved by enhancing understanding of administrative services, facilitating dialogue with village stakeholders, and conducting practical exercises in drafting administrative documents. The activity was organized by the Public Administration Student Association of the Faculty of Social and Political Sciences at the Islamic University of Makassar and held at the Bontolempang Village Office Hall, Bontoa District, Maros Regency, on April 30, 2026. Participants included village officials, administrative staff, and the Family Welfare Empowerment (PKK) group, with students serving as facilitators and learning partners. A participatory-descriptive approach was employed, incorporating coordination, material presentation, dialogue, workshops, practical administrative document drafting, and documentation. The results indicate that participants engaged enthusiastically and gained a better understanding of village administrative service mechanisms, correspondence structures, and the importance of fast, transparent, and accountable services in the digital era. Hands-on practice helped participants grasp the application of the material within the context of village administration. The activity also strengthened interactions among students, the village government, and the community. Despite technical challenges and limited participation from some team members, collaboration among the parties involved ensured the activity proceeded as planned. This initiative demonstrates that dialogue- and practice-based assistance can serve as a means to strengthen village administrative capacity while providing a learning platform for students to implement public service principles.

Keywords: Village Administration, Public Service, Responsive Collaboration, Digitalization, Community Empowerment

Abstrak

Sapa Publik merupakan kegiatan pengabdian berbasis kolaborasi yang diarahkan pada optimalisasi administrasi desa menuju kemandirian melalui penguatan pemahaman pelayanan administrasi, dialog dengan pemangku kepentingan desa, dan praktik penyusunan dokumen administrasi. Kegiatan dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Makassar di Aula Kantor Desa Bontolempang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros pada 30 April 2026. Sasaran kegiatan meliputi perangkat desa, admin desa, dan kelompok Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan mahasiswa berperan sebagai fasilitator dan mitra pembelajaran. Pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif-deskriptif melalui koordinasi, penyampaian materi, dialog, workshop, praktik penyusunan surat administrasi, dan dokumentasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengikuti rangkaian kegiatan secara antusias dan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pelayanan administrasi desa, struktur surat-menyurat, serta pentingnya pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel pada era digital. Praktik langsung membantu peserta memahami penerapan materi dalam konteks administrasi desa. Kegiatan juga memperkuat interaksi antara mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat. Meskipun terdapat kendala teknis dan keterbatasan partisipasi sebagian anggota tim, kolaborasi antar pihak memungkinkan kegiatan berjalan sesuai rencana. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan berbasis dialog dan praktik dapat menjadi sarana penguatan kapasitas administrasi desa sekaligus ruang pembelajaran mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip pelayanan publik.

Kata Kunci: Administrasi Desa, Pelayanan Publik, Kolaborasi Responsif, Digitalisasi, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan fungsi penting pemerintahan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dan hak masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menempatkan pelayanan publik sebagai rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks desa, kualitas pelayanan administrasi menjadi bagian penting dari hubungan pemerintah desa dengan masyarakat.

Administrasi desa tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dokumen, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang jelas, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah mengalami perubahan termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, menempatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting dari tata kelola desa.

Perkembangan teknologi informasi juga mendorong perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Digitalisasi dapat membantu mempercepat pengelolaan informasi, memperluas akses, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas. Studi mengenai digitalisasi pemerintahan desa menunjukkan bahwa transformasi digital dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, tetapi pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh kapasitas aparatur, literasi digital, infrastruktur, dan kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan (Ahmad, 2020; Yunas et al., 2023).

Pada tingkat praktik, penguatan administrasi desa dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan keterlibatan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat yang mengembangkan sistem informasi desa dan memberikan pelatihan kepada aparatur menunjukkan pentingnya kombinasi antara teknologi, pendampingan, dan peningkatan kompetensi agar inovasi administrasi dapat digunakan secara berkelanjutan (Izzalqurny et al., 2025; Heryana & Mayasari, 2026). Pendekatan kolaboratif juga relevan karena pelayanan publik melibatkan hubungan antara penyelenggara dan penerima layanan.

Berdasarkan konteks tersebut, Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HIMAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Makassar menyelenggarakan kegiatan Sapa Publik dengan tema "Optimalisasi Administrasi Desa Menuju Kemandirian". Sapa Publik diarahkan untuk melihat mekanisme pelayanan publik di kantor desa, menyerap aspirasi masyarakat, memperkuat pemahaman administrasi, serta mendorong kerja sama mahasiswa, aparatur desa, dan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di Desa Bontolempang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dengan melibatkan perangkat desa, admin desa, dan ibu-ibu PKK.

Tujuan kegiatan adalah: (1) meningkatkan pemahaman peserta mengenai mekanisme pelayanan administrasi desa; (2) memperkenalkan struktur dan tata cara penyusunan surat administrasi desa; (3) mendorong pelayanan yang cepat, transparan, responsif, dan akuntabel; (4) membangun kolaborasi antara mahasiswa, aparatur desa, dan masyarakat; dan (5) memberikan ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan administrasi publik dalam konteks nyata.

METODE

Kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan partisipatif-deskriptif yang disesuaikan dengan karakter kegiatan Sapa Publik. Pendekatan ini menempatkan mahasiswa, perangkat desa, dan masyarakat sebagai pihak yang saling berinteraksi. Evaluasi hasil dilakukan secara deskriptif berdasarkan keterlibatan peserta, interaksi selama diskusi, praktik workshop, dan catatan pelaksanaan:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi pembentukan TeamWork, pembagian tugas, koordinasi internal, komunikasi dengan pihak desa, penyusunan materi workshop, persiapan perlengkapan, dan pengaturan pendanaan. Struktur kerja dibagi ke dalam fungsi acara, konsumsi, desain, dan tugas pendukung lainnya. Dalam proses persiapan terdapat dinamika internal berupa kesibukan pribadi, hubungan emosional antaranggota yang belum optimal, dan variasi tanggung jawab. Kondisi tersebut diatasi melalui komunikasi dan koordinasi agar kegiatan tetap berjalan.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 30 April 2026 di Aula Kantor Desa Bontolempangang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Rangkaian kegiatan mencakup registrasi dan pembukaan, sambutan dari unsur HIMAP, pemerintah desa, dan program studi, penyampaian materi workshop pelayanan administrasi kantor desa di era digital, diskusi Sapa Publik, dokumentasi, dan penutupan. Materi dan praktik diarahkan pada mekanisme pelayanan administrasi desa, struktur surat-menyurat, serta pelayanan publik yang efektif dan responsif.

3. Tahap Praktik dan Evaluasi

Setelah penyampaian materi, peserta mengikuti praktik workshop penyusunan surat administrasi desa. Peserta diberi kesempatan mengikuti arahan pendamping dan bertanya ketika mengalami kesulitan. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi dan respons peserta selama diskusi dan praktik, serta refleksi terhadap kendala pelaksanaan. Model praktik dipilih agar materi administrasi tidak berhenti pada pemahaman konseptual, tetapi dapat dikaitkan dengan pekerjaan administratif yang dihadapi peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Kegiatan Sapa Publik berlangsung di Aula Kantor Desa Bontolempangang dengan melibatkan mahasiswa, perangkat desa, admin desa, dan kelompok PKK. Peserta menunjukkan antusiasme dan partisipasi yang cukup baik sejak registrasi, pembukaan, penyampaian materi, diskusi, hingga praktik workshop. Suasana kegiatan berlangsung kondusif dan komunikatif sehingga memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara pemateri, pendamping, dan peserta.

Materi workshop memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelayanan administrasi desa, struktur surat-menyurat, serta prinsip pelayanan yang efektif dan responsif. Tercatat bahwa sebagian peserta masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai administrasi desa berbasis digital. Pada sesi praktik, peserta mengikuti proses penyusunan surat administrasi sesuai format yang diperkenalkan oleh pendamping. Interaksi berlangsung dua arah karena peserta dapat mengajukan pertanyaan ketika mengalami kesulitan.



Gambar 1 Pembukaan dan workshop Sapa Publik

Pelaksanaan kegiatan juga menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk menerapkan konsep administrasi publik dalam situasi nyata. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu menyampaikan materi, mendampingi praktik, dan membangun komunikasi dengan perangkat desa serta masyarakat.



Gambar 2 Praktik Workshop Pelayanan Administrasi Desa

Pembahasan

Konsep “Kolaborasi Responsif” dalam kegiatan ini menekankan komunikasi aktif, koordinasi, dan kemampuan menanggapi kebutuhan masyarakat. Mahasiswa ditempatkan sebagai mitra pembelajaran yang membantu memberikan edukasi dan pendampingan, sedangkan pemerintah desa menjadi pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan. Masyarakat menjadi penerima sekaligus sumber masukan mengenai pengalaman pelayanan.

Kolaborasi tersebut penting karena optimalisasi administrasi desa tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak. Pemerintah desa membutuhkan aparatur yang mampu menjalankan prosedur, masyarakat membutuhkan informasi dan akses yang jelas, sedangkan perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui pengetahuan, pendampingan, dan inovasi. Pendekatan seperti ini sejalan dengan gagasan co-production dalam pelayanan publik, yaitu adanya kerja bersama antara penyelenggara dan warga dalam proses penyediaan layanan (Van Eijk & Steen, 2015; Li et al., 2023).

Administrasi desa pada era digital membutuhkan kesiapan sumber daya manusia selain perangkat teknologi. Digitalisasi dapat membantu mempercepat pelayanan, meningkatkan keteraturan data, memperluas akses informasi, dan memperkuat transparansi. Namun, literasi digital, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan tata kelola organisasi tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan (Yafie et al., 2025; Anggraeni et al., 2025). Oleh karena itu, kegiatan Sapa Publik menempatkan edukasi dan praktik sebagai langkah awal membangun kesiapan administrasi.

Kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya pembelajaran berbasis praktik. Pelatihan yang disertai praktik dan pendampingan dapat membantu peserta menghubungkan konsep dengan kebutuhan pekerjaan sehari-hari. Hal tersebut sejalan dengan kegiatan pengabdian yang menempatkan pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas sebagai unsur penting dalam penguatan pelayanan desa (Heryana & Mayasari, 2026; Izzalqurny et al., 2025).



Gambar 3 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Sapa Publik

Secara keseluruhan, kegiatan memberikan manfaat pada tiga sisi. Bagi masyarakat dan PKK, kegiatan memberikan pemahaman mengenai pelayanan administrasi desa. Bagi perangkat desa, kegiatan menjadi ruang berbagi dan diskusi mengenai pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Bagi mahasiswa, kegiatan menjadi media pembelajaran kontekstual untuk menghubungkan konsep administrasi publik dengan praktik pelayanan di tingkat desa. Namun, karena LPJ tidak menyediakan data pre-test dan post-test atau instrumen kepuasan peserta, peningkatan pengetahuan tidak dinyatakan dalam angka. Evaluasi kuantitatif dapat ditambahkan pada kegiatan berikutnya.

KESIMPULAN

Kegiatan Sapa Publik dengan tema “Optimalisasi Administrasi Desa Menuju Kemandirian” merupakan bentuk pengabdian yang menggabungkan edukasi, dialog, workshop, dan praktik administrasi. Kegiatan di Desa Bontolempangang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, pada 30 April 2026 melibatkan mahasiswa, perangkat desa, admin desa, dan kelompok PKK. Pelaksanaan menunjukkan partisipasi peserta yang baik dan terciptanya interaksi yang komunikatif selama materi, diskusi, dan praktik.

Kegiatan memberikan manfaat terutama dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai mekanisme pelayanan administrasi desa, struktur surat-menyurat, dan pentingnya pelayanan yang efektif, cepat, transparan, dan akuntabel. Kolaborasi mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi unsur penting dalam pelaksanaan kegiatan. Meskipun terdapat kendala teknis dan keterbatasan partisipasi sebagian anggota tim, kegiatan tetap dapat terlaksana sesuai tujuan.

Untuk keberlanjutan, kegiatan serupa perlu diarahkan pada pendampingan bertahap, penguatan kompetensi digital aparatur dan masyarakat, penyediaan panduan administrasi yang sederhana, serta evaluasi yang lebih terukur. Dengan demikian, konsep kolaborasi responsif dapat berkembang dari kegiatan satu kali menjadi proses penguatan kapasitas administrasi desa yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2020). Adopting incremental innovation approaches in the digitalization of village government services. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 24(2). <https://doi.org/10.22146/jkap.54028>
- Anggraeni, S. N., Haryati, E., & Ferriswara, D. (2025). Transformation of public services of village and village governments by era digital. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(2). <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i2.513>
- Heryana, N., & Mayasari, R. (2026). Pelatihan perangkat desa untuk mewujudkan good village government berbasis teknologi informasi dan komunikasi. *Jurnal AbdiMas Nusa Mandiri*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.33480/abdimas.v8i1.5038>
- Izzalqurny, T. R., Yanto, A. F. F., & Ferdiansyah, R. A. (2025). Data House: Digitalization profile and dynamics population Wonorejo with website development for support becoming a Smart Village. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 208–218. <https://doi.org/10.32815/jpm.v6i1.2402>
- Li, C., Wu, J., Zhang, H., & Han, Z. (2023). Co-production and citizens' satisfaction with public services: The case of environmental public services in China. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 21(1), 117–142. [https://doi.org/10.4335/21.1.117-142\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.1.117-142(2023))
- Solong, A. (2021). *Kajian teori organisasi dan birokrasi dalam pelayanan publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir Malik. (2021). *Pengantar ilmu administrasi publik*. Makassar: Kretakupa Print.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Van Eijk, C. J. A., & Steen, T. P. S. (2015). Why engage in co-production of public services? Mixing theory and empirical evidence. *International Review of Administrative Sciences*, 82(1). <https://doi.org/10.1177/0020852314566007>
- Yafie, A. A., Santosa, I., & Masrukin. (2025). Bentuk dan faktor penerapan digitalisasi pelayanan publik oleh pemerintah. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 16(1), 69–78. <https://doi.org/10.51903/jtikp.v16i1.973>
- Yunas, N. S., Hakim, A. I., & Pohan, I. A. (2023). Triple disruption dan percepatan akselerasi transformasi digital di desa: Studi inovasi kebijakan Smart Kampung di Banyuwangi. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 7(2), 87–97. <https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.87-97>